

ABSTRAK

Norwegia merupakan salah satu negara yang masih aktif melakukan aktivitas perburuan paus. Menjadi satu-satunya negara yang konsisten mempertahankan perburuan paus komersialnya hingga saat ini, dengan memanfaatkan mekanisme objection pada pasal V ICRW untuk bebas dari aturan moratorium International Whaling Commission (IWC) tentang perburuan komersial pada tahun 1982. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan Norwegia terhadap moratorium IWC tersebut melalui dua kerangka analisis yaitu teori rezim internasional dan kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen resmi IWC, jurnal akademis, serta wawancara dengan narasumber ahli. Penelitian ini menggunakan teori rezim internasional milik Krasner, konsep kepatuhan dan ketidakpatuhan milik Chayes dan Chayes, serta konsep kepentingan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan Norwegia terhadap rezim internasional disebabkan oleh kombinasi persoalan rezim dan kepentingan nasional. *Pertama*, kelemahan struktural rezim IWC yang terlihat dari pengabaian komite ilmiah, ambiguitas norma, dan ambiguitas aturan yang secara bersamaan melemahkan efektivitas rezim. *Kedua*, kepentingan nasional Norwegia yang berpusat pada faktor politik memengaruhi dalam mempertahankan aktivitas perburuan paus. Selama inkonsistensi masih terjadi pada rezim IWC, maka tidak akan ada perubahan fundamental dari posisi Norwegia dalam isu perburuan paus komersial.

Kata kunci: International Whaling Commission (IWC), Moratorium Perburuan Komersial, Rezim Internasional, Kepentingan Nasional, Norwegia

ABSTRACT

Norway is one of the countries that still actively engages in whaling activities. It is the only country that has consistently maintained its commercial whaling activities to date, utilizing the objection mechanism in Article V of the ICRW to be exempt from the International Whaling Commission (IWC) moratorium on commercial whaling in 1982. This study aims to analyze the factors behind Norway's rejection of the IWC moratorium through two analytical frameworks: international regime theory and national interest theory. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through a literature review of official IWC documents, academic journals, and interviews with expert sources. This study uses Krasner's international regime theory, Chayes and Chayes's concepts of compliance and non-compliance, and the concept of national interest. The results show that Norway's non-compliance with the international regime is caused by a combination of regime issues and national interests. First, the structural weaknesses of the IWC regime are evident in the neglect of scientific committees, the ambiguity of norms, and the ambiguity of rules that simultaneously weaken the regime's effectiveness. Second, Norway's national interests that heavy on political factors, influence each other in maintaining whaling activities. As long as inconsistencies persist in the IWC regime, there will be no fundamental change in Norway's position on the issue of commercial whaling.

Keywords: International Whaling Commission (IWC), Commercial Whaling, International Regime, National Interest, Norway